

**MENDORONG KEBIJAKAN PARTISIPATIF
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS IMPLEMENTASI BLSM DI KOTA KENDARI)¹**

Eka Suaib²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dari sisi proses implementasi kebijakan BLSM. Berdasarkan perspektif tersebut, suatu program berhasil jika pelaksanaan program sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Metode penelitian pemantauan implementasi BLSM ini bersifat eksploratif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana proses implementasi BLSM di lapangan serta menemukan berbagai masalah yang muncul sekitar implementasi program tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kota Kendari menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kantor Pos selaku penyalur Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Statistik sebagai penyedia data Rumah Tangga Sasaran (RTS), Dinas Sosial Kota Kendari, 4 orang TKSK, 3 orang Kepala Kelurahan, dan Bappeda Kota (TKPK). Kesimpulan penelitian yakni: (1) Jika melihat dari persiapan program, pelaksanaan, penyaluran KPS, dan dana secara umum dikatakan berhasil. Indikator secara umum yakni penyaluran tahap I BLSM di Kota Kendari mencapai prosentase 94,78 %. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 97,91 %. Prosentase di atas lebih tinggi secara nasional yang hanya mencapai 92,70 %; (2) Sosialisasi juga masih lemah yang terlihat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembayaran, lebih banyak diadakan hanya khusus untuk jajaran pemerintah dengan desain yang sangat sentralistik, dan waktu yang agak mepet sehingga mereka tidak terlalu memahami setiap tahapan pelaksanaan program BLSM. Keterpaduan dan koordinasi antar lembaga belum terlihat dengan jelas; (3) Koordinasi yang tidak nyambung antar pelaksana program di lapangan (*street bureaucracy level*). Saran penelitian yakni (1) perlu kebijakan yang partisipatif untuk mengakomodasi keanekaragaman karakteristik dan tuntutan lokal; (2) perlu dibentuk komite BLT yang melibatkan berbagai unsur terkait. Komite ini bertugas untuk melakukan pendekatan langsung berupa dialog kepada masyarakat untuk merespons aksi protes masyarakat akibat dugaan salah sasaran. Hasil pertemuan bisa menyepakati pendaftaran ulang mereka yang berhak menerima bantuan BLSM secara lebih terbuka.

Kata kunci: *monitoring implementation*, BLSM, kebijakan partisipatif.

ABSTRACT

This research aims to examine the process of implementation of BLSM policy. Based on that perspective, a program will success if the realization of the program is appropriate with the given guidelines policy. The method of observing BLSM implementation is explorative with objectives to find out how the process of BLSM implementation in the field as well as to note various problems that occurred around the implementation itself. This research is a case study in Kendari using qualitative approach. The informants of this study are Post office as the supplier of social protection card, statistics as the data provider of targeted households, social department of Kendari, 4 people of TKSK, 3 chiefs of sub districts, and Bappeda Kota (TKPK). The conclusions of this study are: (1) if it is seen from the program preparation, implementation, channelization step 1 of BLSM in Kendari which reached 94,78 %. For Southeast Sulawesi, it is 97,91 %. This percentage is higher than national level which only reached 92,70 %; (2) socialization it is also

¹Hasil Penelitian

²Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari.

still weak, seen from the stage of preparation, implementation, until the payment which were conducted more for only government party with very centralistic design, and a bit hurried time so that they do not really understand every phase of implementation of BLSM program. In addition, the cohesiveness and coordination among departments is not clear yet; (3) The unconnected coordination in conducting the program in the field (street bureaucracy level). Suggested Research are: (1) need local participative policy aimed to accommodate the diversity in local characteristics and demand; (2) the local government at the Kecamatan level immediately forms a BLT that involved various stakeholders. This committee was created to respond to community protest actions resulting from suspecting wrong target. The result of meeting can agree also immediately under took the re-registration in a more open.

Keywords: monitoring implementation, BLSM, participative policy.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 juta (23,43 %) pada tahun 1999 menjadi 30,02 juta (12,49 %) tahun 2011. Indonesia juga diklaim mampu menurunkan angka tercepat kemiskinan. Tercatat pada rentang 2005 s.d. 2009, Indonesia mampu menurunkan laju jumlah kemiskinan per tahun sebesar 0,8 %. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brazil yang berada dikisaran 0,1 % per tahun. Hanya saja krisis ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman sehingga meningkatkan angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 juta (17,47 %) tahun 1996.

Jika dikaji dan mencermati kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sesungguhnya sudah banyak yang telah digulirkan. Guna meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15/2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8-10 % pada akhir tahun 2014.

Saat ini, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yakni KPS (Kartu Perlindungan Sehat), Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), PKH (Program Keluarga Harapan), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BSM (Bantuan Siswa Miskin), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), KUR (Kredit Usaha Rakyat). Berbagai program tersebut masih dilaksanakan dan jika diukur secara kuantitatif telah membuahkan hasil. Kendati prosentasenya menurun tajam dan tinggal 12,49 %, tetapi dengan jumlah angka kemiskinan 30,02 juta masih cukup besar.

Berbagai macam program di atas yang dilakukan oleh pemerintah secara teoritis masuk kajian implementasi kebijakan. Pressman & Wildawsky (1978) mempunyai sudut pandang bahwa sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dengan tindakan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan atau kemampuan untuk membuat kaitan-kaitan tindakan dalam suatu mata rantai sebab akibat guna mencapai hasil yang diinginkan. Sementara Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum dari tindakan administratif yang dapat diamati sebagai suatu tindakan kebijaksanaan yang spesifik, dan proses implementasi baru bisa dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijaksanaan-

dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi dan (d) struktur birokrasi. Keempat variabel itu saling berhubungan satu sama lain.

Guna merealisasikan kebijaksanaan intervensi penanganan terhadap kemiskinan tersebut, maka pemerintah mencanangkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program ini dirancang dalam rangka melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari guncangan ekonomi jangka pendek. Program tersebut merupakan jaring pengaman sosial yang terdiri dari perluasan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Subsidi Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Skema pelaksanaan P4S yakni terdiri atas beberapa program seperti Subsidi Beras Bagi MBR, Program Keluarga Harapan, dan BSM. Program Subsidi Beras Bagi MBR secara reguler memberikan bantuan beras sebesar 15 kg per RTS-PM setiap bulan. Dalam program P4S mereka diberikan tambahan 3 bulan bantuan (@ 15 kg). Program PKH, secara reguler sudah diberikan bantuan tunai Rp.1,4 juta per Rumah Tangga per tahun dan melalui P4S maka ada peningkatan nilai bantuan menjadi Rp.1,8 juta per Rumah Tangga per tahun. Dalam program BSM, secara reguler sudah ada bantuan tunai yakni untuk SD Rp. 380 ribu per tahun, SMP yakni Rp. 450 ribu per tahun dan SMA yakni Rp. 750 ribu per tahun. Melalui P4S maka ada peningkatan nilai bantuan menjadi SD: Rp. 450 ribu per tahun, SMP: Rp. 750 ribu per tahun, SMA: Rp. 1 juta per tahun.

Sementara itu, program BLSM adalah salah satu program dalam paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan yang terkena dampak kenaikan dampak har-

ga bahan bakar minyak. BLSM diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dengan nilai bantuan sebesar Rp. 150.000 per bulan selama 4 bulan.

Menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam implementasi BLSM, maka penelitian dilaksanakan untuk mengadakan pemantauan tentang program tersebut. Pemantauan dilakukan secara khusus Kota terpilih, melalui studi kasus, untuk melihat bagaimana implementasi BLSM di lapangan.

Sebagaimana diketahui bahwa BLSM merupakan salah satu program untuk melindungi orang miskin akibat kenaikan harga BBM. Hingga saat ini program tersebut sedang berlangsung. Karena masih berlangsung, maka tidaklah bisa diukur keberhasilan program dari sisi hasil dari sisi hasil (*outcome*). Namun demikian, keberhasilan program tersebut tersebut dikaji dari sisi proses (implementasi). Berdasarkan perspektif ini, suatu program berhasil, kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan.

B. METODE PENELITIAN

Pemantauan pelaksanaan/implementasi BLSM ini akan bersifat eksploratif³ dengan maksud untuk mengetahui bagaimana proses implementasi BLSM di lapangan serta menemukan berbagai masalah yang muncul sekitar implementasi program tersebut.

Penelitian ini merupakan studi kasus di Kota Kendari, karena alasan pokok di lokasi penelitian ditemukan pelaku kebijakan tentang BLSM. Oleh karena penelitian ini hanya dilakukan di Kota Kendari, maka pe-

³ Sebagaimana diketahui penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bersifat penjajakan (Effendi dan Sigarimbun). Biasanya penelitian ini merupakan tahap awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa. Dengan kata lain penelitian untuk mengembangkan hipotesa-hipotesa yang akan diuji pada tahapan-tahapan penelitian berikutnya (Vredenberg, 1980).

nelitian tergolong studi kasus. Alasannya dengan mengingat besarnya wilayah yang harus diteliti (bila menggunakan survey) serta luasnya wilayah penerapan program. Karena itu studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang paling tepat untuk dipakai dalam penelitian ini. Dalam konteks ini studi kasus harus dilihat dari asumsi-asumsi dasarnya. Kasus merupakan bagian yang lain untuk itu harus dapat dilihat sebagai dirinya sendiri di mana ia merupakan satu sistem yang memiliki fungsi atau kasus merupakan bagian-bagian dari kasus lain yang lebih besar.

Pendekatan penelitian yakni kualitatif, yaitu berusaha mendapat informasi yang lengkap mengenai bagaimana pelaku kebijakan individu mengimplementasikan di lapangan. Informan penelitian adalah Kantor Pos selaku penyalur Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Statistik sebagai penyedia data Rumah Tangga Sasaran (RTS), Dinas Sosial Kota Kendari, 4 orang TKSK, 3 orang Kepala Kelurahan, dan Bappeda Kota (TKPK).

Proses analisis data dilakukan dengan wawancara terbuka. Analisis data dilakukan menjadi 2 bagian (1) bagian deskripsi yang berisi gambaran tentang latar belakang pengamatan, tindakan dan pembicaraan, dan (2) reflektif yang berisi pendapat, gagasan, komentar, tafsiran, dan label yang diberikan oleh peneliti. Analisis setelah meninggalkan lapangan, antara lain berupa pembuatan kategori termuan seperti kategori rumah tangga miskin, penataan kebijakan oleh para aktor kebijakan, pola-pola pemanfaatan bantuan dari rumah tangga miskin.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk proses selanjutnya adalah mengikuti yang dinyatakan Miles dan Huberman (1984) sebagai berikut. Pertama membuat deskripsi atau catatan langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan informan disesuaikan dengan tujuan peneliti-

an. Dalam proses reduksi bertujuan meng-golongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahajn empiris sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. Kedua, sajian data dalam hal ini proses pengumpulan data dilanjutkan dan pembuatan data deskripsi sehingga unit-unit dirasakan sudah cukup. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilaksanakan aktivitasnya pada saat pengumpulan data sudah cukup atau sudah selesai.

C. ANATOMI PROGRAM BLSM

BLSM adalah kompensasi yang diberikan pemerintah kepada orang miskin guna mengurangi beban ekonomi yang semakin menekan kehidupan mereka sebagai akibat naiknya harga BBM yang membawa dampak karena semakin melambungnya harga kebutuhan pokok.

Pemerintah melalui BLSM menyalurkan bantuan sementara kepada Rumah Tangga Miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. Program ini diberikan kepada 15,5 juta dengan tingkat sosial ekonomi terendah berdasarkan Basis Data (BD-T) hasil PPLS 2011. BLSM diharapkan mampu membantu untuk mempertahankan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup. BLSM dimaksudkan juga mempertahankan daya beli masyarakat dan rentan pada saat gejolak harga setelah kenaikan BBM untuk jangka waktu 4-5 bulan dengan membantu masyarakat miskin melalui masa-masa sulit tanpa harus menjual aset atau hak milik mereka.

Program ini merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli rumah tangga (RT) miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan dengan sasaran RT miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup, pembelian obat-obatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan keperluan-keperluan lainnya. BLSM bu-

kan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dan menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi.

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta RT dengan tingkat sosial terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. Besaran BLSM yakni sebesar Rp. 150.000/bulan selama 4 bulan. Penyaluran dibagi dua tahap yakni Juni/Juli sebesar Rp. 300.000 dan pembayaran kedua September Rp. 300.000.

D. BLSM DAN PROGRAM KOM-PENSASI YANG LAIN

Selain BLSM, ada juga program kompensasi yang lain dan telah dianggarkan pada APBN-P 2013 yakni tambahan anggaran 27,73 triliun dan total 64,17 triliun. Adapun program dimaksud yakni Beras Miskin (Raskin), Bea Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I). Deskripsi singkat program akan dipaparkan pada uraian berikut.

Program Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi RTS dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial. Tujuan program selain untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTLS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras juga untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pemerintah.

Program BSM adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung pada anak usia sekolah/siswa di semua jenjang pendidikan (mulai SD hingga SMA/ sederajat) yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mencegah siswa putus sekolah, menarik

anak usia sekolah dan rumah tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah, serta mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, bahkan hingga tingkat pendidikan tinggi.

PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RT-SM) dengan status sosial ekonomi 7 % terendah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar. Keluarga PKH akan menerima bantuan tunai bersyarat apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksa kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil. Peserta PKH juga memperoleh program raskin, BSM dan Jamkesmas.

Program P4I merupakan bagian dari program kompensasi khusus yang berupa penyediaan infrastruktur pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, pembangunan sistem penyediaan air minum, dan sumber daya air lainnya untuk desa nelayan, daerah rawan air, pemukiman kumuh, maupun wilayah miskin perkotaan. Tujuan program memberikan kemudahan akses masyarakat miskin dalam pelaksanaan infrastruktur dasar di pedesaan dan perkotaan, meningkatkan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

E. PERSIAPAN PROGRAM

Dalam hal persiapan program, hal yang paling krusial yakni penyediaan data jumlah masyarakat miskin yang layak menerima bantuan sebagai sasaran/target program (*benefeciaries program*). Guna memenuhi hal dimaksud, pemerintah sudah mengucurkan program yang disebut Basis

Data Terpadu (BDT)⁴. Dalam program tersebut berusaha untuk melakukan pendataan seluruh rumah tangga miskin yang berpotensi menjadi penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan. Basis data yang dihasilkan dari program BDT akan digunakan untuk mengekstrak berbagai daftar penerima program perlindungan sosial yang dimiliki oleh beberapa lembaga pemerintah seperti PKH, Jamkesmas, Raskin, BSM, dan sebagainya.

Dengan pola seperti di atas, untuk program BLSM tahun 2013, data yang digunakan yakni sudah tersedia sejak 3 tahun dan tidak sempat lagi untuk diadakan updating data. Selain itu, sumber data 'terlalu sentralistik' karena tidak memberi ruang untuk perbaikan. Penyedia data yakni dari BPS, dan institusi lain hanya sebagai pemakai saja. Akibatnya, banyak pihak yang meragukan validasi data sehingga di penerima BLSM menjadi kacau. Memang menjadi pertanyaan mengapa data tahun 2011 yang digunakan untuk tahun 2013. Dalam kurun waktu dua tahun pasti terjadi mobilitas masyarakat. Ada yang meninggal, lahir, bahkan ada yang sudah berubah perekonomiannya. Kekacauan seperti ini yang menimbulkan permasalahan di lapangan.

PT. Pos Indonesia yang diserahkan oleh pemerintah untuk membagikan BLSM, sejak tanggal 22 Juni 2013 sudah melaksanakan program. Hanya saja, belum semua daerah yang bisa mendistribusikan melainkan hanya di 15 kota besar yakni Malang, Solo, Medan, Palembang, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Solo, Malang, Makassar, dan Ambon. Sementara Bandung dan Jayapura tanggal 24 Juni. Kemudian mulai

tanggal 25 Juni penyaluran dilaksanakan di 34 Provinsi dan mulai 1 Juli 2013 untuk seluruh kabupaten, kota dan kecamatan.

Meski PT. Pos sudah berusaha untuk mempersiapkan diri untuk implementasi program dengan baik, tetapi sebagian karyawan juga sempat ada kecemasan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Soalnya, alokasi waktu yang sangat mepet, faktor keamanan dan pengamanan pendistribusian KPS yang jumlahnya cukup besar merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.

Sukses tidaknya program sangat tergantung dari sosialisasi program. Melalui sosialisasi berupaya untuk memperkenalkan program, waktu pelaksanaan, mekanisme program, manfaat, dan dampak program. Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi program BLSM adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang prinsip, prosedur, kebijakan, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan BLSM. Metode sosialisasi bisa melalui pertemuan langsung, penyebaran brosur, dan media informasi.

Pertemuan langsung dilakukan dengan menggunakan pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan BLSM. Bisa juga dilakukan secara informal menggunakan pertemuan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi program BLSM lebih banyak diadakan oleh pemerintah pusat. Metode utamanya yakni melalui pertemuan formal dan sifatnya untuk memastikan kesiapan semua komponen untuk menyukseskan program. Sementara di level provinsi dan kabupaten/kota media sosialisasi hanya berupa brosur yang disebar oleh Kementerian Sosial.

Hasil penelitian, media sosialisasi dilakukan dengan tiga metode utama yakni pertemuan formal, penyebaran brosur, dan media elektronik. Pertemuan formal yakni dipimpin langsung oleh wakil presiden berupa rapat koordinasi. Berbagai pertemuan di level nasional dan diliput oleh media ele-

⁴ Basis data terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40 % RTS dengan status kesejahteraan sosial terendah secara nasional atau yang dikategorikan sebagai kelompok menengah ke bawah. Persentase RTS di setiap wilayah akan berbeda-beda, tergantung kepada tingkat kemiskinan lokal.

elektronik dan cetak rupanya telah banyak diketahui oleh warga masyarakat tentang program BLSM. Berbagai pertemuan yang dilaksanakan di level pusat lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan formal di internal masing-masing sehingga tercapai persepsi yang sama tentang BLSM. Dengan mengetahui konsep-konsep dasar dan filosofi program, maka akan sangat membantu para pelaku pendukung program baik di tingkat provinsi, kabupaten hingga level implementor program paling bawah. Frekuensi dan intensitas sosialisasi di level lebih rendah adalah sangat ditentukan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Hanya saja yang pasti bahwa melalui sosialisasi yang diadakan pada berbagai level untuk memastikan kesiapan implementor program di lapangan.

F. PELAKSANAAN PROGRAM

Pendistribusian KPS dimulai sejak 15 Juni 2013. Sesuai dengan data yang ada, maka KPS yang masuk ke Kantor Pos Kendari yakni sebanyak 9.758. Kecamatan yang paling banyak KPS masuk yakni di Puwatuu, disusul Andunohu, Kendari. Sementara yang paling sedikit yakni di Kecamatan Kambu.

Pada saat distribusi KPS penyaluran tahap I, tidak semua KPS dapat didistribusikan. Ada yang gagal antar. Untuk Kota Kendari, KPS yang gagal antar yakni 62. Secara umum, petugas pos dapat mengidentifikasi alamat KPS. Kesulitan kecil kadang timbul karena nama yang tercantum dalam KPS bukan nama sehari-hari yang dikenal oleh tetangganya. Seperti, hanya pada umumnya panggilan kepala rumah tangga adalah nama anak tertua sehingga banyak yang tidak mengetahui nama aslinya. Kesulitan besar dihadapi oleh petugas pos karena karena rumah kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak, dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal. Jika ada KPS yang gagal antar, maka petugas pos

akan melaporkan ke kantor pos pusat dan selanjutnya melaporkan juga ke aparat pemerintah kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, tampak bahwa daya serap pembayaran BLSM tahap I mencapai 97,91. Angka di atas lebih tinggi secara nasional yang hanya mencapai 92,70 %. Kota Kendari sendiri berada pada nomor urut setelah Kolaka Utara, Buton, Muna, Bombana, Buton Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Kota Bau-Bau. Daya serap yang paling tinggi yakni di wilayah Kab. Kolaka Utara dengan persentase 99,97 % dan hanya menyisakan 3 RTS. Sementara yang paling rendah yakni di Kab. Konawe Utara dengan persentase 60,50 % dengan RTS 1.345.⁵

Pemerintah melalui program BLSM menyalurkan bantuan sementara kepada RTS dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. Diberikan kepada 15,5 juta di seluruh Indonesia dengan tingkat sosial ekonomi terendah berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. BLSM diberikan sebesar Rp. 150.000/bulan untuk empat bulan. Pembayaran dua kali dengan lokasi dan jadwal pembayaran ditentukan kantor pos.

Pada saat akan dibayarkan, petugas PT. Pos mencocokkan daftar nominatif masyarakat yang akan menerima bantuan yang ditunjukkan dengan kepemilikan dengan KPS dan dilengkapi dengan identitas pendukung (KTP dan KK). BLSM yang akan disalurkan kepada para penerimanya dikontrol lewat lembaran yang telah disediakan di masing-masing kantor pos. Setelah menerima bantuan, maka masyarakat akan membubuhkan tanda tangan atau cap jari jempol pada lembaran yang telah disiapkan.

⁵ www.kompensasi.info diakses tanggal. 21 Agustus 2013.

G. PEMANTAUAN

Institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan pemantauan adalah di pusat dan daerah. Level pusat yakni sekretariat TNP2K dengan anggota pokja monitoring dan evaluasi, tim advokasi TNP2K, pokja bantuan sosial kluster 1, pokja dan gugus tugas lain yang terkait program. Sementara di level provinsi dan kab/kota yakni TKPK yakni Bappeda, pokja dari dinas terkait dan SKPD terkait. Masing-masing lembaga mempunyai fungsi.

Kegiatan monitoring pada program BLSM ini banyak mengandalkan pada *layanan web site* yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia dan layanan SMS yang disebarkan melalui poster. PT. Pos Indonesia memberikan layanan portal informasi mengenai pelaksanaan program, seperti ketentuan pembayaran, jumlah rumah tangga miskin, rekapitulasi nasional, dan rekapitulasi realisasi provinsi. Sedangkan pengaduan pelaksanaan program maupun pengaduan kepersetaan disediakan sarana pengaduan yaitu LAPOR UK4 (www.lapor.ukp.go.id).

H. PENUTUP

Dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik simpulan bahwa (1) program BLSM terkesan sebagai program ‘dadakan’ yang hanya mengejar target waktu untuk meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM. Hal itu nampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin, penyebaran KPS yang tidak maksimal; (2) keterpaduan dan koordinasi antar lembaga belum terlihat dengan jelas; (3) mekanisme tentang tata cara pemantauan di lapangan sudah rinci dibuat, hanya saja perlu pelatihan untuk menyamakan persepsi khususnya pelaksana birokrat lapangan (*street bureaucracy level*) perlu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo. 1985. *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Akademi-mika.
- Anderson, James E.. 1979. *Public Policy Making*, New York. Holt, Rine Hart and Winston.
- Bappenas. 2000. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*.
- Barrientos, Armando. 2010. *Social Protection and Poverty Social Policy and Development Programme Paper Number No. 42, E-paper*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Conway, T.A de Haan, A. Norton (eds.) *Social Protection: new Direction of Donor Agencies*. 2000. Social Development Departmen. London.
- Edward III, George. 1980. “*Implementing Public Policy*”, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Grindle, S. Merilee (ed.). 1980. *Political and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Miles, BM, & Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*, New Delhi: Fine Forge Press.
- Nasution, Darmin. 1993. “*Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*”, dalam *Prospektif*, volume 5 Nomor 4.
- Ravallion, Martin. 1998. ‘*Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study*’, *Working Paper No. 133*, World Bank.
- SMERU. 2012. ‘*Kajian Cepat Terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*’, *Laporan Penelitian*, Jakarta.

- World Bank Institute. 2005. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.
- Yin, Robert K.. 1984. *Case Study Research, Design and Methods*, Sage Publication, London.